

# **PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2023**  
**Bagian Anggaran 005.04**

Jl. Lingkar Selatan Dukuh Jagalan RT. 14 RW. 05

Salatiga - Jawa Tengah 50736

Telp. 0298-322853 Fax. 0298-325243

e-mail : pa\_salatiga@yahoo.co.id



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Lingkar Selatan Dukuh Jagalan RT. 14 RW. 05**

**Telp. 0298-322853 Fax. 0298-325243**

**Salatiga - Jawa Tengah 50736**

**e-mail : pa\_salatiga@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Salatiga adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Salatiga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salatiga, 30 September 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



ADHI KURNIAWAN, S.Kom., S.H.  
NIP.198407182009041004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Jalan Lingkar Selatan, Cebongan, Kecamatan Argomulyo  
Kota Salatiga, Jawa Tengah 50736 www.pa-salatiga.go.id, pa\_salatiga@yahoo.co.id

Salatiga, 16 Oktober 2023

Yth. Kepala KPPN Semarang II

Jalan Ki Mangunsarkoro No.34 Semarang- 50241

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 2100/SEK.PA.W11-A13/KU2.1/X/2023

Nomor	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Keuangan dan CaLK Pengadilan Agama Salatiga (400921) Triwulan III Tahun 2023	1 bendel	Disampaikan dengan hormat sebagai laporan. Demikian atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Agama Salatiga



Adhi Kurniawan, S.Kom., S.H.

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vi
Ringkasan .....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	7
II. Neraca .....	9
III. Laporan Operasional.....	12
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	15
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	17
A.    Penjelasan Umum .....	17
A.1.    Dasar Hukum .....	17
A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Salatiga .....	18
A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	19
A.4.    Basis Akuntansi.....	19
A.5.    Dasar Pengukuran .....	19
A.6.    Kebijakan Akuntansi .....	20
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	28
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	28
B.2.    Belanja .....	29
C.    Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	32
C.1.    Aset Lancar .....	32
C.2.    Aset Tetap.....	33
C.3.    Aset Lainnya .....	35
C.4.    Kewajiban Jangka Pendek .....	36
C.5.    Ekuitas .....	37
D.    Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	38

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	38
D.2.	Beban Pegawai .....	38
D.3.	Beban Persediaan .....	38
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	39
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	40
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	40
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	40
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	41
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	41
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	41
D.11.	Beban Lain-lain .....	41
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	41
D.13.	Pos Luar Biasa .....	42
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	43
E.1.	Ekuitas Awal .....	43
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	43
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan .....	43
E.4.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar .....	44
E.5.	Transaksi Antar Entitas .....	44
E.6.	Ekuitas Akhir .....	44
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	45
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	45
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	45
	Laporan-laporan Pendukung .....	47
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	48
	Data Pendukung Laporan Keuangan .....	50



# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022.....	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022.....	3
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang .....	26
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	27
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 September TA 2023 .....	28
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022 .....	28
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 .	29
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 .....	29
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022 .....	30
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang .....	31
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 .....	32
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	32
Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan .....	33
Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 .....	35
Tabel 15 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 .....	36
Tabel 15 Rincian PNPB untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022 .....	38
Tabel 16 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022	39
Tabel 17 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022 .....	39
Tabel 18 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022 .....	40
Tabel 19 Rincian Koreksi Nilai Persediaan .....	43

# *PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*

## Pengadilan Agama Salatiga

Jl. Lingkar Selatan Dukuh Jagalan RT. 14 RW. 05 Salatiga - Jawa Tengah 50736

Telp. 0298-322853 Fax. 0298-325243 e-mail : pa\_salatiga@yahoo.co.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salatiga, 30 September 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



ADHI KURNIAWAN, S.Kom., S.H.  
NIP.198407182009041004

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Salatiga Periode 30 September Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp32.111.000,00 atau mencapai 61,88 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp51.892.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp22.000.000,00 atau mencapai 86,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp39.860.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran
Pendapatan Negara	51.892.000	32.111.000	61,88	141.059.000	31.289.500	22,18
Belanja Negara	39.860.000	34.460.000	86,45	77.580.000	59.369.683	76,53

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.640.357,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.640.357,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya per 30 September 2023 tersaji sebesar Rp7.785.000,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp7.785.000,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00.

Nilai Ekuitas per 30 September 2023 disajikan sebesar Rp6.855.357,00.

Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 September 2023	31 Desember 2022	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	14.640.357	15.359.057	(718.700)	(4,68)
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>14.640.357</b>	<b>15.359.057</b>	<b>(718.700)</b>	<b>(4,68)</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	7.785.000	0	7.785.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>7.785.000</b>	<b>0</b>	<b>7.785.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	6.855.357	15.359.057	(8.503.700)	(55,37)
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>6.855.357</b>	<b>15.359.057</b>	<b>(8.503.700)</b>	<b>(55,37)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>14.640.357</b>	<b>15.359.057</b>	<b>(718.700)</b>	<b>(4,68)</b>

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp32.111.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp42.963.700,00 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.852.700,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp10.852.700,00).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp15.359.057,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp10.852.700,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.349.000,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp6.855.357,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode



yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 September 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER TA 2023 DAN TA 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	51.892.000	32.111.000	61,88	141.059.000	31.289.500	22,18
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>51.892.000</b>	<b>32.111.000</b>	<b>61,88</b>	<b>141.059.000</b>	<b>31.289.500</b>	<b>22,18</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>						
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	39.860.000	34.460.000	86,45	77.580.000	59.369.683	76,53
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0	0	0,00
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>39.860.000</b>	<b>34.460.000</b>	<b>86,45</b>	<b>77.580.000</b>	<b>59.369.683</b>	<b>76,53</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**  
**NERACA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 September 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1.		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1. 2.	7.785.000	0
Persediaan	C.1. 3.	6.855.357	15.359.057
Jumlah Aset Lancar		14.640.357	15.359.057
Aset Tetap	C.2.		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3.	0	0
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.640.357	15.359.057
<b>KEWAJIBAN</b>			

## Kewajiban Jangka Pendek

C.4.

Dana Pihak Ketiga	C.4. 1.	7.785.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>7.785.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>7.785.000</b>	<b>0</b>

**EKUITAS**

Ekuitas

C.5.

<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>6.855.357</b>	<b>15.359.057</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>14.640.357</b>	<b>15.359.057</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER TA 2023 DAN TA 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	32.111.000	31.289.500
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>32.111.000</b>	<b>31.289.500</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	9.003.700	1.295.347
Beban Barang dan Jasa	D. 4	30.960.000	30.936.683
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	3.000.000	28.033.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>42.963.700</b>	<b>60.265.030</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(10.852.700)</b>	<b>(28.975.530)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>Surplus /Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	D. 12	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus /Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(10.852.700)	(28.975.530)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER TA 2023 DAN TA 2022**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
Ekuitas Awal	E. 1	15.359.057	14.945.887
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(10.852.700)	(28.975.530)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban		0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.349.000	29.610.183
Kenaikan /Penurunan Ekuitas		(8.503.700)	634.653
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>6.855.357</b>	<b>15.580.540</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang

- Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  - n. PMK 215/PMK.05/2016 – Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - o. PMK 212/PMK.05/2019 – Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat
  - p. PMK 171/PMK.05/2021 – Pelaksanaan Sistem SAKTI;
  - q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Salatiga

Visi Pengadilan Agama Salatiga adalah adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SALATIGA YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);
2. Meningkatkan kualitas Aparatur yang professional;
3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Salatiga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap indenpendensi Pengadilan dan proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Salatiga.
2. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.
5. Meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Salatiga.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Laporan Keuangan periode 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Salatiga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI, SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

### **A.4. Basis Akuntansi**

---

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.5. Dasar Pengukuran**

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 September Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau



Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4.) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

## (5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

#### Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,	20

Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8.) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

## (9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

#### (10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah:  
Rp32.111.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp32.111.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Penitera Badan Peradilan	10.000	150.000	1.500,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	12.830.000	9.650.000	75,21
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	39.052.000	22.311.000	57,13
<b>Total Pendapatan</b>		<b>51.892.000</b>	<b>32.111.000</b>	<b>61,88</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp821.500,00 atau 2,63 persen dibandingkan untuk periode yang berakhir 30 September TA 2022 yang mencapai Rp31.289.500,00. Hal ini disebabkan karena:

1. Bertambah pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan;
2. Bertambahnya pendapatan ongkos perkara;
3. Bertambahnya pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Penitera Badan Peradilan	150.000	0	150.000	0,00



2.	Pendapatan Ongkos Perkara	9.650.000	9.480.000	170.000	1,79
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.311.000	21.809.500	501.500	2,30
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>32.111.000</b>	<b>31.289.500</b>	<b>821.500</b>	<b>2,63</b>

## B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara:  
Rp34.460.000

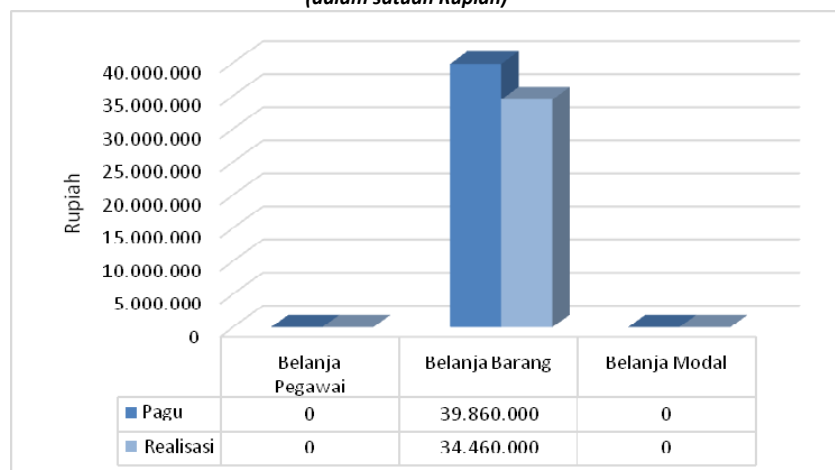
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Salatiga untuk periode yang berakhir pada 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp34.460.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 86,45 persen dari anggaran senilai Rp39.860.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	39.860.000	34.460.000	86,45
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>39.860.000</b>	<b>34.460.000</b>	<b>86,45</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Total Belanja Neto</b>	<b>39.860.000</b>	<b>34.460.000</b>	<b>86,45</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual Tahun 2023

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.909.683,00 atau sebesar 41,96 persen dari realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir 30 September 2022 yang mencapai Rp59.369.683,00. Hal ini disebabkan karena berkurangnya realisasi belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	34.460.000	59.369.683	(24.909.683)	(41,96)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>34.460.000</b>	<b>59.369.683</b>	<b>(24.909.683)</b>	<b>(41,96)</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
Pegawai: Rp0

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Salatiga Bagian Anggaran DIPA 04 tidak memiliki alokasi Belanja Pegawai.

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang:  
Rp34.460.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Salatiga per 30 September TA 2023 dan per 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp34.460.000,00 dan Rp59.369.683,00.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.909.683,00 atau 41,96 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 September TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya realisasi belanja barang non operasional;
2. Berkurangnya realisasi belanja perjalanan dinas biasa;
3. Bertambahnya realisasi belanja barang persediaan;

4. Bertambahnya realisasi belanja perjalanan dinas dalam kota;
5. Bertambahnya realisasi belanja jasa.

Rincian Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
<b>Belanja Barang Non Operasional</b>				
Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	0	0,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Belanja Bahan	0	1.705.000	(1.705.000)	0,00
<b>Total Belanja Barang Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>1.705.000</b>	<b>(1.705.000)</b>	<b>0,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	25.133.000	(25.133.000)	0,00
Belanja Barang Persediaan	500.000	400.000	100.000	25,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	2.900.000	100.000	3,45
<b>Belanja Jasa</b>				
Belanja Jasa Konsultan	30.960.000	29.231.683	1.728.317	5,91
<b>Total Belanja Jasa</b>	<b>30.960.000</b>	<b>29.231.683</b>	<b>1.728.317</b>	<b>5,91</b>
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>34.460.000</b>	<b>59.369.683</b>	<b>(24.909.683)</b>	<b>(41,96)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Neto</b>	<b>34.460.000</b>	<b>59.369.683</b>	<b>(24.909.683)</b>	<b>(41,96)</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja  
Modal: Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Salatiga Bagian Anggaran DIPA 04 tidak memiliki alokasi Belanja Modal.

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

**Aset Lancar:**  
**Rp14.640.357** Nilai Aset Lancar per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.640.357,00 dan Rp15.359.057,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Salatiga per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	7.785.000	0
Persediaan	6.855.357	15.359.057
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>14.640.357</b>	<b>15.359.057</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di Bendahara Pengeluaran:**  
**Rp0**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

**Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2023	31 Desember 2022
1.	Kuitansi UP	0	0
2.	Uang Tunai di Brankas	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

**Kas di Bendahara Penerimaan:**  
**Rp7.785.000**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.785.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah:

**Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**  
*(dalam satuan Rupiah)*

No.	Jenis	30 September 2023	31 Desember 2022
1.	Uang di Bank	7.785.000	0
	Jumlah	7.785.000	0

### C.1.3. Persediaan

**Persediaan:**  
**Rp6.855.357**

Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.855.357,00 dan Rp15.359.057,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C.2. Aset Tetap

**Aset Tetap: Rp0**

Nilai Aset Tetap per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

### C.2.1. Tanah

**Tanah: Rp0**

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan Mesin: Rp0**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2023 dan 31

Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan: Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan, Irigasi,  
dan Jaringan: Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan: Rp0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap:0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.3. Aset Lainnya

*Aset Lainnya: Rp0* Nilai Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud: Rp0* Saldo aset tak berwujud per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan barang milik negara (BMN) yang berupa software antivirus.

#### C.3.2. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-lain: Rp0* Saldo aset lain-lain per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Salatiga serta dalam proses penghapusan dari BMN.

#### C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya: Rp0* Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

## C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek:  
Rp7.785.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.785.000,00 dan Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Salatiga per 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 15 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2023	31 Desember 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	7.785.000	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

### C.4.1. Dana Pihak Ketiga

*Dana Pihak  
Ketiga:  
Rp7.785.000*

Jumlah Dana Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.785.000,00 dan Rp0,00. Dana Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

### C.4.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.



## C.5. Ekuitas

---

*Ekuitas:*  
*Rp6.855.357*

Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.855.357,00 dan Rp15.359.057,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

**Pendapatan PNPB:** Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar Rp32.111.000,00 dan Rp31.289.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 16 Rincian PNPB untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	150.000	0	150.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	9.650.000	9.480.000	170.000	1,79
3.	Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.311.000	21.809.500	501.500	2,30
<b>Total Pendapatan</b>		<b>32.111.000</b>	<b>31.289.500</b>	<b>821.500</b>	<b>2,63</b>

### D.2. Beban Pegawai

**Beban Pegawai:** Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3. Beban Persediaan

**Beban Persediaan:** Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.003.700,00 dan Rp1.295.347,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun

tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	9.003.700	1.295.347	7.708.353	595,08
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>9.003.700</b>	<b>1.295.347</b>	<b>7.708.353</b>	<b>595,08</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan  
Jasa:  
Rp30.960.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.960.000,00 dan Rp30.936.683,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Beban Bahan	0	1.705.000	(1.705.000)	0,00
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	30.960.000	29.231.683	1.728.317	5,91
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>30.960.000</b>	<b>30.936.683</b>	<b>1.728.317</b>	<b>5,91</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban Pemeliharaan:** Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban Perjalanan Dinas:** Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp28.033.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 30 September TA 2023 dan TA 2022  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	25.533.000	(25.533.000)	0,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.000.000	2.500.000	500.000	20,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000</b>	<b>28.033.000</b>	<b>(25.033.000)</b>	<b>(89,30)</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

**Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat: Rp0** Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial: Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi: Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih: Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional: Rp0*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### **D.13. Pos Luar Biasa**

*Beban Pos Luar  
Biasa: Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 30 September TA 2023 dan 30 September TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

**Ekuitas Awal:** Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.359.057 dan Rp14.945.887,00.

### E.2. Surplus (defisit) LO

**Surplus(defisit) LO:** Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar (Rp10.852.700,00) dan (Rp28.975.530,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Nilai Persediaan

**Koreksi Nilai Persediaan:** Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 20 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

#### **E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar**

*Koreksi Aset Tetap: Rp0* Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

*Transaksi Antar Entitas: Rp2.349.000* Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.349.000,00 dan Rp29.610.183,00.

#### **E.6. Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir: Rp6.855.357* Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.855.357,00 dan Rp15.580.540,00.



## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada periode 30 September 2023.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. BRI Cabang Salatiga A/C 651544009211000 a.n. BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp0,00.
2. BRI Cabang Salatiga A/C 0081-01-000699-30-8 a.n. RPL 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp7.785.000,00.

#### F.2.4. Revisi DIPA

DIPA Pengadila Agama Salatiga (SP DIPA-005.04.2.400921/2023) pada triwulan III tahun 2023 mengalami revisi sebanyak 2 kali meliputi:

1. Revisi DIPA ke 01 tanggal 13 Februari 2023, yaitu revisi mengenai pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
2. Revisi DIPA ke 02 Tanggal 11 April 2023, yaitu revisi mengenai pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Pada triwulan III tahun 2023 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, SSPB.

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

Tidak terdapat catatan penting lainnya pada laporan keuangan periode 30 September 2023 ini.

# *LAPORAN PENDUKUNG*

*RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Agama Salatiga**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Per 30 September 2023**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>A. Peralatan dan Mesin</b>					
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0
2.	Alat Ukur	0	0	0	0
3.	Alat Kantor	0	0	0	0
4.	Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
5.	Alat Studio	0	0	0	0
6.	Alat Komunikasi	0	0	0	0
7.	Alat Kedokteran	0	0	0	0
8.	Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0
9.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	0	0	0	0
10.	Komputer Unit	0	0	0	0
11.	Peralatan Komputer	0	0	0	0
<b>B. Gedung dan Bangunan</b>					
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0
<b>C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>					
1.	Jaringan Listrik	0	0	0	0
<b>D. Aset Tetap Lainnya</b>					
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	0
<b>E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>					
1.	Alat Kantor	0	0	0	0
2.	Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
3.	Alat Studio	0	0	0	0
4.	Komputer Unit	0	0	0	0
5.	Peralatan Komputer	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				0	
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				0	

*DATA PENDUKUNG LAPORAN  
KEUANGAN*

# DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 30 September 2023

Neraca per 30 September 2023

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca Percobaan Akrua

Neraca Percobaan Kas

Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal

LRA Pendapatan

LRA Belanja

Laporan Posisi BMN di Neraca

Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel

Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel

Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan

Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel

Daftar Rekening Satuan Kerja 30 September 2023

Rekening Koran per 30 September 2023

Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN

Memo Penyesuaian

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04  
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SALATIGA 400921

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 15/10/23 6:56 AM  
Halaman : 1  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2023			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0		
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	51.892,000	32.111,000	(19.781,000)	62	141.059,000	109.769,500
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>51.892,000</b>	<b>32.111,000</b>	<b>(19.781,000)</b>	<b>62</b>	<b>141.059,000</b>	<b>109.769,500</b>
B	BELANJA				0		
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	39.860,000	34.460,000	5.400,000	86	77.580,000	18.210,317
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
	<b>BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04  
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SALATIGA 400921

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 15/10/23 6:56 AM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
		3	4	5	6	3	4	5	6
1	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>39.860,000</b>	<b>34.460,000</b>	<b>5.400,000</b>	<b>86</b>	<b>77.580,000</b>	<b>59.369,683</b>	<b>18.210,317</b>	<b>86</b>
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

Salatiga, 15 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS



ADHI KURNIAWAN S.KOM  
198407182009041004

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : ( 400921 ) PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 15/10/23 6:56 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	7,785,000	0	7,785,000	0.00
Persediaan	6,818,207	15,359,057	(8,540,850)	(55.61)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>14,603,207</b>	<b>15,359,057</b>	<b>(755,850)</b>	<b>(4.92)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>14,603,207</b>	<b>15,359,057</b>	<b>(755,850)</b>	<b>(4.92)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	7,785,000	0	7,785,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>7,785,000</b>	<b>0</b>	<b>7,785,000</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>7,785,000</b>	<b>0</b>	<b>7,785,000</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	6,818,207	15,359,057	(8,540,850)	(55.61)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>6,818,207</b>	<b>15,359,057</b>	<b>(8,540,850)</b>	<b>(55.61)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>6,818,207</b>	<b>15,359,057</b>	<b>(8,540,850)</b>	<b>(55.61)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>14,603,207</b>	<b>15,359,057</b>	<b>(755,850)</b>	<b>(4.92)</b>

Keterangan :

FINAL

Salatiga, 15 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
**SEKRETARIS**  
  
**ADHI KURNIAWAN S.KOM**  
198407182009041004

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 400921 ) PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Tgl Data : 15/10/23 12:00 AM

Tgl Cetak : 15/10/23 6:55 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	32,111,000	31,289,500	821,500	2.625
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	32,111,000	31,289,500	821,500	2.625
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	32,111,000	31,289,500	821,500	2.625
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	9,040,850	1,295,347	7,745,503	597.948
Beban Barang dan Jasa	30,960,000	30,936,683	23,317	0.075
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	3,000,000	28,033,000	(25.033.000)	(89.298)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
 SATUAN KERJA : ( 400921 ) PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Tgl Data : 15/10/23 12:00 AM

Tgl Cetak : 15/10/23 6:55 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>43,000,850</b>	<b>60,265,030</b>	<b>(17,264,180)</b>	<b>(28.647)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(10,889,850)</b>	<b>(28,975,530)</b>	<b>18,085,680</b>	<b>(62.417)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(10,889,850)</b>	<b>(28,975,530)</b>	<b>18,085,680</b>	<b>(62.417)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(10,889,850)</b>	<b>(28,975,530)</b>	<b>18,085,680</b>	<b>(62.417)</b>

Keterangan :

FINAL



Salatiga, 15 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS

ADHI KURNIAWAN S.KOM  
198407182009041004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 SEPTEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : ( 400921 ) PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/10/23 6:55 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	15,359,057	14,945,887	413,170	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,889,850)	(28,975,530)	18,085,680	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,349,000	29,610,183	(27,261,183)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8,540,850)	634,653	(9,175,503)	-
EKUITAS AKHIR	6,818,207	15,580,540	(8,762,333)	-

Keterangan :

FINAL

Salatiga, 15 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



ADHI KURNIAWAN S.KOM

198407182009041004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005  
**ESELON I** : 04  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0300  
**SATUAN KERJA** : 400921

**MAHKAMAH AGUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

**Kode Lap** : LRA.P.E1.1  
**Tanggal** : 15/10/23 6:58 AM  
**Halaman** : 1  
**Prg ID** : lap\_lra\_pen\_akun\_saiker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	10,000	150,000	0	150,000	1500
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Pamitera Badan Peradilan	12,830,000	9,650,000	0	9,650,000	75.21
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	39,052,000	22,311,000	0	22,311,000	57.13
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51,892,000	32,111,000	0	32,111,000	61.88
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	51,892,000	32,111,000	0	32,111,000	61.88
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	51,892,000	32,111,000	0	32,111,000	61.88
	JUMLAH PENDAPATAN	51,892,000	32,111,000	0	32,111,000	61.88

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005  
 ESELON I : 04  
 WILAYAH/PROVINSI : 0300  
 SATUAN KERJA : 400921  
 JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG  
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 JAWA TENGAH  
 PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 15/10/23 6:57 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 15/10/23 6:57 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	500,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultansi	36,360,000	36,360,000	30,960,000	0	30,960,000	85.15	5,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,360,000	36,360,000	30,960,000	0	30,960,000	85.15	5,400,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	39,860,000	39,860,000	34,460,000	0	34,460,000	86.45	5,400,000
	JUMLAH BELANJA	39,860,000	39,860,000	34,460,000	0	34,460,000	86.45	5,400,000



**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 400921 ) PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Tgl Data : 15/10/23 12:00 AM

Tgl Cetak : 15/10/23 6:56 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	7,785,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,818,207	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	7,785,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	34,460,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	32,111,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	15,359,057
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	150,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	9,650,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	22,311,000
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	30,960,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	9,040,850	0
<b>JUMLAH</b>			<b>89,715,057</b>	<b>89,715,057</b>

Keterangan :

FINAL

Salatiga, 15 Oktober 2023  
 Penanggung Jawab UAKPA  
**SEKRETARIS**  
  
 ADHI KURNIAWAN S.KOM  
 198407182009041004

**NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 400921 ) PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/10/23 6:56 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	34,460,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	32,111,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	150,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	9,650,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	22,311,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	30,960,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>66,571,000</b>	<b>66,571,000</b>

Keterangan :

FINAL

Salatiga, 15 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS  
  
ADHI KURNIAWAN S.KOM  
198407182009041004



**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005  
UNIT ORGANISASI : 04  
WILAYAH/PROVINSI : 0300  
SATUAN KERJA : 400921

MAHKAMAH AGUNG  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
JAWA TENGAH  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Tgl. Cetak 15/10/2023 6:59 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_satker--rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,359,057	0
0.0	391111	Ekuitas	0	15,359,057
<b>JUMLAH</b>			<b>15,359,057</b>	<b>15,359,057</b>

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**UAKPB : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Tgl.Data : 15/10/23 6:00 AM  
Tgl.Cetak : 15/10/23 7:14 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	6,818,207
<b>J U M L A H</b>		<b>6,818,207</b>



**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**

**UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**UAPP-E1 : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 15/10/23 7:13 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_salker

1	2	3	4			5			6			7		
			SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			BERTAMBAH			BERKURANG		
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG													
			4	5	6	7	8	9	10	11				



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG  
UAKPB : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Tgl Data : 15/10/23 6:00 AM  
Tanggal : 15/10/23 7:13 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_alb\_salker

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITITAS	NILAI
			KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		





LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023

Tanggal : 15/10/2023 07.14.11  
 Halaman : 1 dari 1  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_salker

NAMA UAKPB : 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KODE	JENIS TRANSAKSI	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN 2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL</b>							

**REKAPITULASI DAFTAR REKENING BANK  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA  
PER 30 SEPTEMBER 2023**

No.	Satuan Kerja		Rekening				Bank			Persetujuan Rekening		
	BA	Es.1	Kode	Nomor	Nama	Jenis Kode	Kode	Nama	Cabang	Kode Rekening	Nomor	Tanggal
1	005	01	400920	653244009201000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA	50	002	BRI	Salatiga	520002000990	S-2732/WPB.12/KP.06/2020	16-10-2020
2	005	04	400921	651544009211000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA	50	002	BRI	Salatiga	520002000990	S-1654/WPB.12/KP.06/2020	23-06-2020
3	005	04	400921	008101000699308	RPL 134 PA SALATIGA	30	0081	BRI	Salatiga	520002000990	No. S-3424/MK.5/2015	27-04-2015

  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Sekretaris  
 Adhi Kurmiawan, S.Kom., S.H.  
 NIP 198407182009041004

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210  
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



**INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT**

MAHKAMAH AGUNG (005)  
DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA (400921)  
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG O (032901004361303)  
Virtual Account : 651644009211000 | BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA  
Periode : 01-09-2023 s/d 30-09-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-07-10	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Mutasi									
Saldo Akhir							0,00		

BRI Virtual Dashboard  
Last Update : 29-09-2023 Pukul 14:48:19



HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 400921  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	39,860,000	39,860,000	0
2	Belanja	34,460,000	34,460,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	51,892,000	51,892,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	32,111,000	32,111,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-OCT-23*



## MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG RI  
 Eselon I : (04) BADAN PERADILAN AGAMA  
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH  
 Satuan Kerja : (400921) PENGADILAN AGAMA SALATIGA  
 No. Dokumen : 001/MP.04/2023  
 Tanggal : 1 Januari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Balik Saldo Rekening RPL

**Kategori Jurnal Penyesuaian / Jurnal Penyesuaian Neraca / Jurnal Koreksi / Jurnal Umum:**

1	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	16	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
2	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
3	<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	18	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
4	<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
5	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	20	<input type="checkbox"/>	Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	21	<input type="checkbox"/>	KasLainnya di BLU
6	<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	22	<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
7	<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Penerimaan	23	<input type="checkbox"/>	Perolehan Aset
8	<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	24	<input type="checkbox"/>	Koreksi Piutang/utang
9	<input type="checkbox"/>	Persediaan	25	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung
10	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban	26	<input type="checkbox"/>	
11	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27	<input type="checkbox"/>	
12	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Balik
13	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29	<input type="checkbox"/>	Penyesuaian Neraca
14	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30	<input type="checkbox"/>	Jurnal Koreksi
15	<input type="checkbox"/>	Pelepasan Aset Tetap /Aset Lainnya	31	<input type="checkbox"/>	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	30.000	
2	K	212192	Dana Pihak Ketiga		30.000

**Keterangan:**

Penjurnalan dilakukan untuk mencatat jurnal balik saldo rekening RPL yang dieliminasi pada 31 Desember 2022.

Dibuat oleh :  
Kasubbag Umum dan Keuangan

  
Ratna Evayanti, S.E.

NIP 198705092011012014  
Tanggal : 1 Januari 2023

Dijetujui oleh :



Siti Khalimah, S.H.

NIP 196501031987032002  
Tanggal : 1 Januari 2023

Direkam oleh :  
Operator Modul GLP

  
Haifa Raida, S.E.

NIP 199012222020122008  
Tanggal : 1 Januari 2023

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (400921) Pengadilan Agama Salatiga  
 Kode dan Nama UAPPAW : (0300) Jawa Tengah  
 Kode dan Nama Eselon 1 : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama  
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
	<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
	<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
	<b>To Do List</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak

2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/19/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak



11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya

Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak

5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya

### TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk*

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL,

Hajifa Raida, S.E.  
NIP 19901222020122008



Salatiga, 30 September 2023

Penelaah,

Adhi Kurniawan, S.Kom., S.H.

NIP 198407182009041004



005

04

0300

400921

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER TAHUN 2023